

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses yang dalam jangka panjang akan meningkatkan pendapatan per kapita penduduk. Definisi ini mengandung tiga sifat penting, yaitu : (1) pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang berarti sebuah perubahan dan terjadi secara terus menerus. (2) sebuah usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita penduduk. (3) peningkatan pendapatan per kapita penduduk harus berlangsung dalam jangka panjang (Suryana, 2000). Pembangunan ekonomi pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari tingkat PDRB suatu daerah dan laju pertumbuhan atas dasar harga konstan, serta skala pertumbuhan ekonomi yang cepat akan berakibat pada disparitas distribusi pendapatan.

Arsyad (2004), menyatakan bahwa pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang meliputi pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, dan perbaikan tenaga kerja yang ada. Sehingga mampu menghasilkan produk serta jasa yang lebih baik, identifikasi pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan juga pembangunan perusahaan baru. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja bagi

masyarakat daerah, dengan demikian pembangunan daerah akan berjalan dengan baik dan mampu mendorong tingkat pembangunan nasional.

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terus meningkat yang terjadi di negara berkembang tidak secara otomatis mampu menghilangkan ketimpangan dalam pembangunan ekonomi (*disparity*). Ketimpangan tersebut umumnya terjadi pada aspek pendapatan, spasial dan sektoral, hal ini dapat dilihat dari masyarakatnya. Di mana golongan kaya semakin kaya sedangkan yang miskin semakin miskin, wilayah maju terus berkembang meninggalkan wilayah terbelakang dan adanya sektor unggulan yang berkontribusi besar dalam pembangunan sedangkan sektor non unggulan menjadi beban. Ketimpangan pembangunan juga dapat dilihat secara vertikal dan horizontal, secara vertikal pembangunan dilihat dari perbedaan distribusi pendapatan sedangkan secara horizontal dilihat dari perbedaan antara daerah maju dan daerah terbelakang (Sjafrizal, 2008).

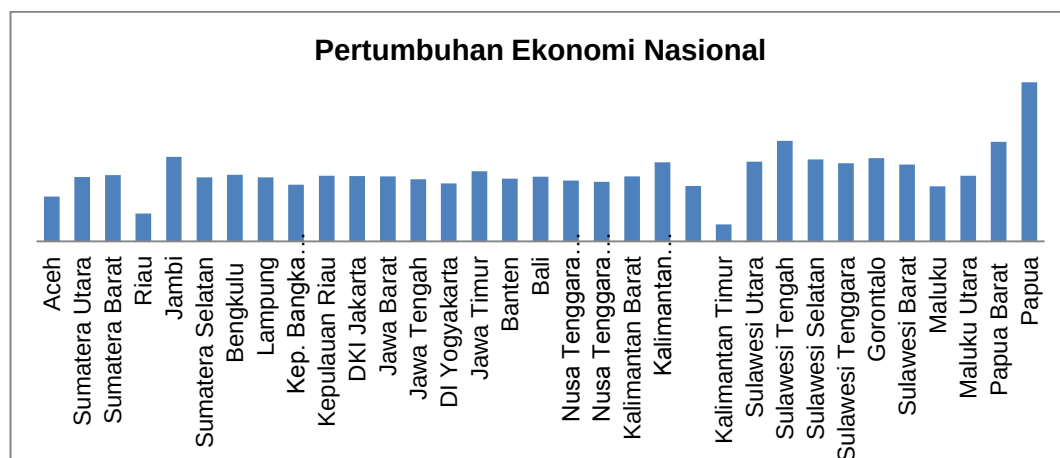
Pemerataan pembangunan maupun pendapatan merupakan aspek yang ingin dicapai dalam sebuah proses pembangunan suatu negara, terutama Negara Sedang Berkembang, namun pada kenyataannya masih banyak hambatan atau masalah yang muncul dalam suatu proses pembangunan yang meliputi masalah eksternal maupun masalah internal. Negara Dunia Ketiga atau dengan kata lain disebut dengan Negara Sedang Berkembang (NSB) merupakan negara yang membutuhkan perhatian lebih dalam aspek pembangunan ekonomi termasuk didalamnya Negara Indonesia, hal ini disebabkan karena NSB berkeinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas dan juga memprioritaskan pemerataan pembangunan di negaranya.

Di Indonesia sendiri kebijakan pembangunan didasarkan pada karakteristik sosial ekonomi suatu daerah, dikarenakan setiap daerah memiliki kualitas dan kuantitas sumber daya yang berbeda baik sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya yang didukung juga dengan kondisi geografis masing-masing daerah. Selain itu Indonesia juga menganut sistem kebijakan otonomi yang berawal dari sentralisasi menjadi desentralisasi dengan tujuan menciptakan pembangunan ekonomi wilayah yang mandiri, hal ini tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. UU RI Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, membahas bahwa kebijakan pemerintah pusat memberi wewenang terhadap pemerintah daerah dalam mengatur maupun mengurus pemerintahan melalui desentralisasi maupun dekonsentrasi (Badrudin, 2012).

Demikian halnya dengan pembangunan yang dilakukan oleh Provinsi Papua yang merupakan salah satu provinsi terluas di Indonesia dengan penduduk sekitar 20 persen dari penduduk Indonesia. Sedangkan sebanyak 70 persen penduduk Provinsi Papua bertempat tinggal di kampung-kampung terpencil, pedalaman, pulau kecil serta perbatasan negara dengan kondisi topografis yang kurang baik sehingga sulit diakses oleh pelayanan publik, pembangunan, pemerintah dan pelayanan jasa kemasyarakatan (Djojosoekarto dkk, 2008). Selain itu provinsi ini juga kaya akan sumber daya alamnya yang kemudian dijuluki dengan raksasa yang sedang tidur (terutama dari sektor pertambangan). Hal tersebut dikarenakan sektor pertambangan telah mampu menyumbang lebih dari 50 persen perekonomian di Provinsi Papua yang meliputi

komoditas tembaga, emas, minyak dan gas. Ada sumber daya simpanan 2,5 milyar ton bahan tambang emas & tembaga yang dikelola oleh PT. Freeport, 540 juta m³ potensi lestari kayu komersial dan 9 juta ha hutan konversi yang digunakan untuk pembangunan perkebunan skala besar (Djojosoekarto dkk, 2008). Provinsi Papua dengan warisan budayanya dijuluki wilayah kebudayaan yang sangat unik dan kaya, memiliki bahasa lokal yang berjumlah tidak kurang dari 250 bahasa (Riani dan Pudjihardjo, 2012). Namun dengan adanya budaya dan sumber daya yang melimpah Papua merupakan Provinsi dengan masyarakat miskin terbanyak dibanding dengan provinsi lain di Indonesia.

Pada dasarnya Provinsi Papua yang merupakan kawasan paling tertinggal dari berbagai sisi pembangunan dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Namun merupakan salah satu kawasan di Indonesia yang mampu memberikan sumbangan pendapatan nasional tertinggi, terutama dari hasil eksploitasi pertambangannya. Adapun tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia menurut provinsi pada tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar 1.1. Provinsi Papua merupakan provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi paling tinggi diantara 33 provinsi di Indonesia.



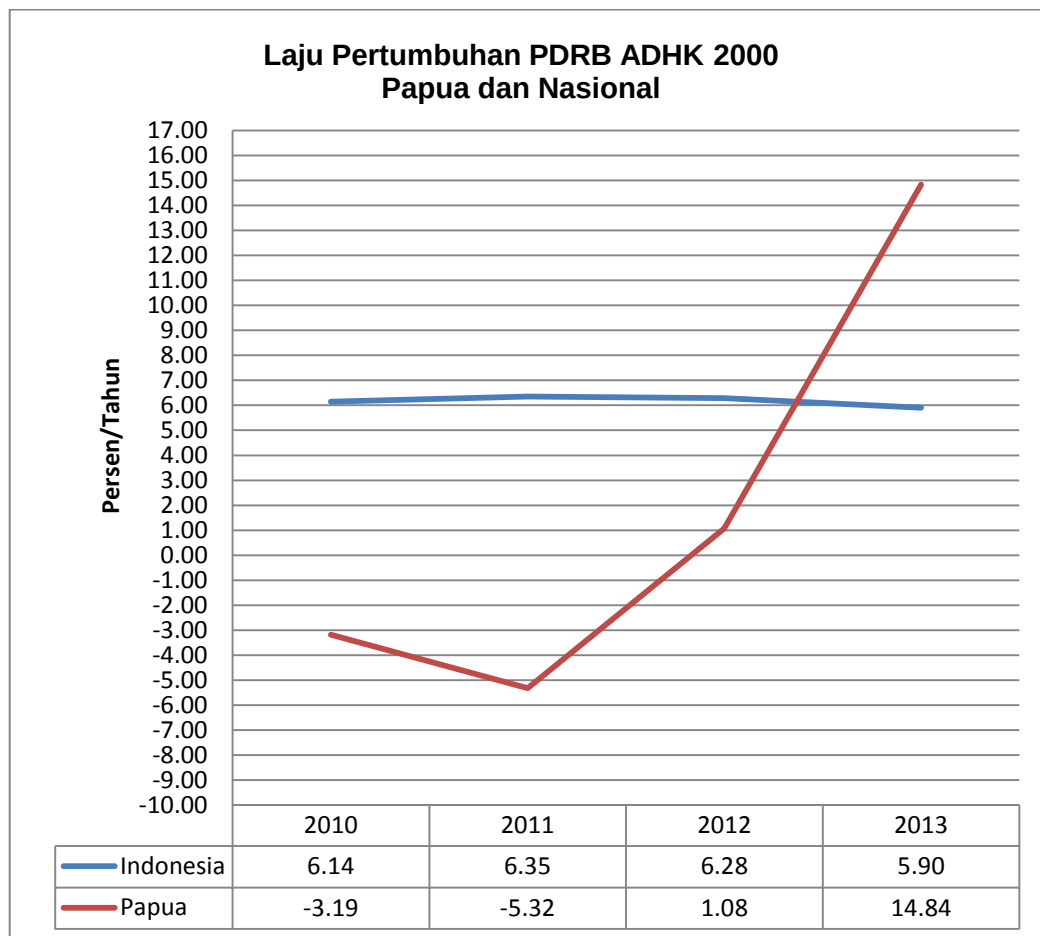
Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2013

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2013

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa di tahun 2013 Provinsi Papua merupakan provinsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi paling tinggi dibanding dengan provinsi lain di Indonesia yaitu sebesar 14,84 persen, disusul dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 9,38 persen dan seterusnya, sedangkan tingkat pertumbuhan paling rendah adalah Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar 1,59 persen.

Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua pada tahun 2013 seperti pada Gambar 1.1 dipengaruhi oleh adanya industri padat modal produksi tambang khususnya PT. Freeport yang meningkat tajam sebesar 29,77 persen, karena pada tahun tersebut terdapat peningkatan produksi terhadap sektor tambang (BPS, 2014). Laju produksi tambang sangat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua. Hal itu dikarenakan sektor pertambangan memberikan kontribusi paling besar dalam pembentukan atau penambahan PDRB di Papua.

Tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua dari tahun ke tahun pada periode tahun 2010 hingga tahun 2013 berfluktuasi yang pada dua tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.2 yang merupakan perbandingan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2000 antara Provinsi Papua dengan Indonesia.



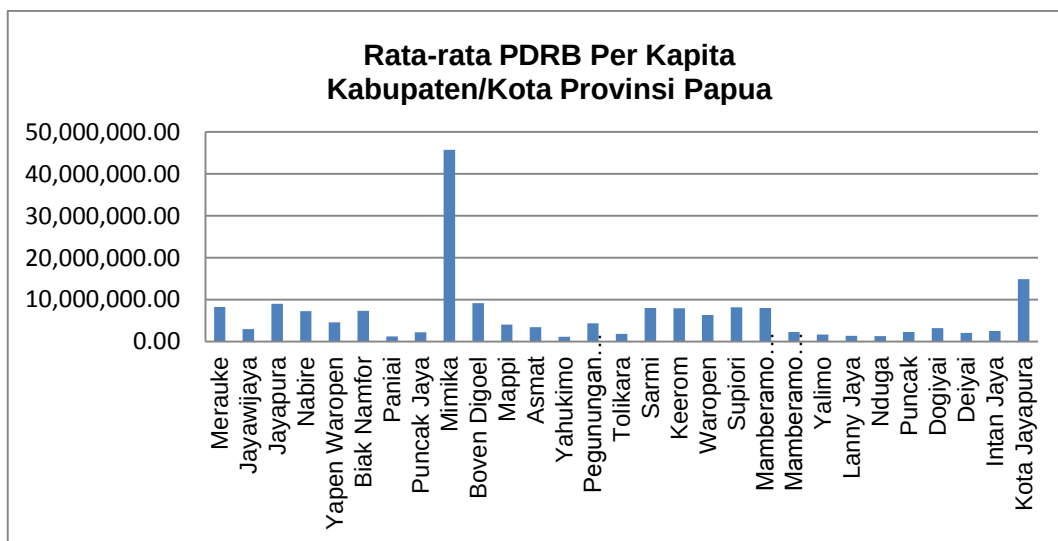
Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2013

**Gambar 1.2 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2000
Papua dan Nasional Tahun 2010-2013**

Dari Gambar 1.2 diatas dapat dilihat bahwa kinerja perekonomian atau laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua pada periode 2010 – 2013 laju pertumbuhan ekonomi tersebut cukup baik dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil namun pada akhirnya mengalami sedikit penurunan di tahun 2013 dari 6,28 persen di tahun 2012 menurun menjadi 5,90 persen di tahun 2013, berbeda dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua yang justru mengalami peningkatan tajam di tahun 2013 dari 1,08 persen di tahun 2012 meningkat menjadi 14,84 di tahun 2013. Namun, meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua di tahun 2013

menghasilkan nilai rata-rata sebesar 1,85 persen yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu sebesar 6,17 persen, hal ini disebabkan karena laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua tidak stabil. Sedangkan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua terjadi di tahun 2011 yang sangat kecil yaitu sebesar 5,32 persen.

Namun demikian, laju pertumbuhan ekonomi yang cukup baik di Provinsi Papua tersebut tidak diikuti dengan meratanya tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari PDRB per kapita di tiap kabupaten/kota Provinsi Papua. Artinya meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua tentu tidak diikuti dengan meratanya pembangunan ekonomi di Provinsi Papua.



Sumber : BPS Papua, 2013 (diolah)

Gambar 1.3 Rata-rata PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2010-2013

Dilihat berdasarkan Gambar 1.3 PDRB per kapita masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Papua periode tahun 2010 hingga tahun 2013 yang memiliki PDRB per kapita tertinggi adalah Kabupaten Mimika dengan nilai rata-rata sebesar 45.732.194,19 rupiah, yang kemudian disusul oleh Kota Jayapura

dengan nilai rata-rata sebesar 14.929.934,99 rupiah selanjutnya Kabupaten Boven Digoel dengan nilai rata-rata sebesar 9.187.317,59 rupiah dan Kabupaten Jayapura dengan nilai rata-rata sebesar 9.008.508,65 rupiah. Sedangkan kabupaten/kota di Papua yang memiliki PDRB per kapita paling rendah adalah Kabupaten Yahukimo dengan nilai rata-rata sebesar 1.172.120,03 rupiah, kemudian Kabupaten Paniai dengan nilai rata-rata sebesar 1.267.587,34 rupiah dan seterusnya. Bahkan ada beberapa kabupaten/kota di Papua yang nilai PDRB per kapitanya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai PDRB per kapita di Papua. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya ketimpangan pembangunan di Papua yang hanya terkonsentrasi pada kabupaten/kota tertentu yang kemudian berdampak pada perbedaan tingkat kesejahteraan di Provinsi Papua.

Tabel 1.1 PDRB ADHB menurut Sektor di Provinsi Papua Tahun 2013

Sektor	2013	Persentase
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15.595.371	13,02
Pertambangan dan Penggalian	45.170.139	37,71
Industri Pengolahan	2.589.378	2,16
Pengadaan Listrik dan Gas	31.864	0,03
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	71.804	0,06
Konstruksi	13.173.858	11,00
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.766.477	8,15
Transportasi dan Pergudangan	5.808.798	4,85
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	876.157	0,73
Informasi dan Komunikasi	4.359.673	3,64
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.090.183	1,75
Real Estate	3.159.760	2,64
Jasa Perusahaan	1.434.929	1,20
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10.095.517	8,43
Jasa Pendidikan	2.423.668	2,02
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.849.261	1,54
Jasa lainnya	1.275.138	1,06
Total	119.771.976	100

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2014 (diolah)

Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti dengan meratanya pendapatan dipengaruhi adanya industri padat modal yaitu PT. Freeport yang bergerak pada sektor pertambangan. Sektor pertambangan merupakan penyumbang tertinggi pada penambahan distribusi PDRB Papua. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 bahwa sektor pertambangan dan penggalan penyumbang tertinggi yaitu sebesar 45.170.139 atau 37,71 persen dari total PDRB ADHB di Provinsi Papua. Namun hal itu tidak berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat Papua, karena masyarakat Papua tidak merasakan keuntungan adanya eksploitasi pertambangan yang dilakukan PT.Freeport di Papua.

Berangkat dari keinginan untuk mengkaji lebih dalam terhadap persoalan tersebut sehingga penulis mengajukan judul penelitian sebagai berikut **“Analisis Disparitas Pendapatan Wilayah dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2010-2013”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan maka perumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat disparitas pendapatan per kapita kabupaten/kota di Provinsi Papua periode tahun 2010-2013 ?
2. Bagaimana klasifikasi pertumbuhan kabupaten/kota di Provinsi Papua periode tahun 2010-2013 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat disparitas pendapatan per kapita kabupaten/kota di Provinsi Papua periode tahun 2010-2013.
2. Untuk mengetahui bagaimana klasifikasi pertumbuhan kabupaten/kota di Provinsi Papua periode tahun 2010-2013.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian yang ingin dan/atau dapat diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Memberikan sumbangan informasi yang tersistematis terkait persoalan ekonomi regional terutama tentang tingkat disparitas pendapatan wilayah dan klasifikasi pertumbuhan di Provinsi Papua.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Provinsi Papua dalam proses pengembangan pembangunan ekonomi dan pengambilan strategi pembangunan.
3. Sebagai masukan dalam ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu ekonomi dan sebagai bahan refrensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika Bab yang terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, serta Bab V Penutup.

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Menguraikan landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai pendekatan penelitian yang digunakan, definisi operasional, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, serta teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum obyek penelitian, analisis hasil dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Menguraikan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran.